

ANALISIS STRATEGI SEKOLAH DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PENJURUSAN DI SMA NEGERI 3 SURAKARTA

Isna Nugraheni¹, Atik Catur Budiati², Nurhadi³

^{1,2,3} Pend. Sosiologi Antropologi FKIP Universitas Sebelas Maret

¹ isnanugraheni37@student.uns.ac.id, ² atikcaturbudiati@staff.uns.ac.id,

³ nurhadi@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the strategy and impact of schools in implementing the policy of eliminating science, social studies and language majors in class X in the Kurikulum Merdeka. The research method uses qualitative descriptiveness with a case study approach at SMA Negeri 3 Surakarta as the research subject. The object of this research is the school mechanism in implementing the policy of eliminating high school majors in the Kurikulum Merdeka. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation techniques, then the research results were compiled and analyzed using Paulo Freire's theory of educational dehumanization. The results of the research show that the strategy for implementing the majors policy is for schools to provide training to all elements of education and provide socialization regarding the flow of majors and major selection for students. In its implementation, the policy of eliminating majors has had a negative impact in the form of dehumanization of education, namely the inability of students to develop their potential and interests due to insufficient educational resources, majors that do not match their abilities, and majors that are still the same as the previous Kurikulum 2013 policy, namely that they are still fixed in science and social studies.

Keywords: Kurikulum Merdeka, Elimination of Majors, Dehumanization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan dampak sekolah dalam melaksanakan kebijakan penghapusan penjurusan IPA, IPS dan Bahasa di kelas X pada Kurikulum Merdeka. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus SMA Negeri 3 Surakarta sebagai subjek penelitian. Objek penelitian ini yaitu mekanisme sekolah dalam melaksanakan kebijakan penghapusan penjurusan SMA pada Kurikulum Merdeka. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian hasil penelitian disusun dan dianalisis dengan teori dehumanisasi pendidikan Paulo Freire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan kebijakan penjurusan adalah dengan sekolah melakukan pembekalan terhadap seluruh elemen pendidik dan memberikan sosialisasi mengenai alur penjurusan, dan pemilihan penjurusan terhadap peserta didik. Dalam pelaksanaannya kebijakan penghapusan penjurusan menimbulkan dampak negatif berupa dehumanisasi pendidikan yaitu ketidak mampuan peserta didik dalam mengembangkan potensi

dan minat yang disebabkan oleh sumber daya pendidik yang kurang, penjurusan yang tidak sesuai kemampuan, dan penjurusan yang masih sama saja seperti kebijakan kurikulum 2013 sebelumnya yakni masih terpaku pada IPA dan IPS.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Penghapusan Penjurusan, Dehumanisasi

A. Pendahuluan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan merupakan usaha mewujudkan suasana pembelajaran secara sadar dan terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik. Namun, dalam pelaksanaan pendidikan pasti banyak terdapat tantangan dan hambatan. Salah satu permasalahan yang ada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu mengenai sistematika penjurusan. Adanya stereotip bahwa jurusan IPA lebih unggul daripada jurusan IPS dan Bahasa berdampak pada minat jurusan yang diambil dimana jurusan IPA adalah jurusan yang paling diminati sehingga jurusan lain dikesampingkan (Agus, A.P., 2022).

Hal tersebut berpengaruh pada potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang tidak sesuai dengan jurusan karena mengutamakan prestise jurusan IPA atau sering terdengar istilah salah jurusan. Tidak hanya itu model penjurusan di awal juga dianggap subjektif kepada calon peserta didik

tanpa mengenali potensi yang dimiliki sehingga peran guru sangat dibutuhkan (Apriadi & Kuswandhie, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat adanya ketidakleluasaan peserta didik dalam mengembangkan potensi yang disebabkan oleh faktor masyarakat atau regulasi pada pelaksanaan pendidikan.

Keterbaruan pendidikan seperti halnya kurikulum menjadi penting dalam memenuhi tuntutan zaman. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang diimplementasikan di Indonesia saat ini. Tujuan utama kurikulum merdeka yaitu menitikberatkan pada hasil (*outcomes*) secara nyata yang dibuktikan dengan kemampuan dan perilaku peserta didik (Suryaman, 2020). Salah satu kebijakan yang diterapkan pada kurikulum ini yakni penghapusan penjurusan di SMA. Menteri Kemendikbud Ristek menuturkan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk kebebasan bagi anak-anak memasuki usia dewasa untuk

dapat memilih karir yang diinginkan (Chaterine, 2022).

Kebebasan dalam menentukan pilihan dan pemikiran sejalan dengan pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan kritis yang menekankan pada pentingnya pembebasan dari kungkungan rasa takut dan tekanan akibat adanya otoritas kekuasaan atau penindasan dan kesadaran dalam berpikir (dehumanisasi). Freire menyatakan manusia yang dianggap sempurna adalah manusia sebagai subjek, bukan objek. Manusia yang bertahan dan beradaptasi pada keadaan adalah bentuk dari pertahanan diri yang rapuh diibaratkan seperti hewan atau dehumanisasi (Freire, 2001, p.3).

Adanya kebebasan peserta didik dalam menentukan minat bakat dan potensinya diwujudkan dengan penghapusan penjurusan di jenjang SMA tertuang dalam Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 162/M/2021 tentang Sekolah Penggerak. Kebijakan penghapusan penjurusan IPA, IPS dan Bahasa di mulai pada tahun ajaran 2022/2023 yang artinya kebijakan ini baru berjalan satu tahun terakhir, dan diterapkan untuk kelas X menuju kelas XI. Peserta didik di kelas X akan mempelajari seluruh mata pelajaran yang sama untuk kemudian

naik kelas XI peserta didik dapat mengambil mata pelajaran wajib dari IPA, IPS dan Bahasa. Kebijakan penghapusan penjurusan SMA ini diharapkan dapat menghapuskan stratifikasi dan stereotip jurusan khususnya pada Sekolah Menengah Atas yang melekat hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, SMA Negeri 3 Surakarta merupakan sekolah favorit di Kota Surakarta dengan jumlah kelas sebelumnya yakni IPA lebih besar dibanding IPS. SMA Negeri 3 Surakarta merupakan salah satu SMA negeri yang menjadi sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Surakarta atau sebagai sekolah percontohan di sekolah penggerak angkatan berikutnya, sehingga kebijakan penghapusan penjurusan dilaksanakan pertama kali pada saat kebijakan ini ditetapkan.

Tujuan penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana strategi sekolah dalam melaksanakan kebijakan penghapusan penjurusan dan menganalisis dampak dari penghapusan terhadap sistem penjurusan di SMA Negeri 3 Surakarta yang kemudian dianalisis menggunakan teori Paulo Freire mengenai dehumanisasi pendidikan. Manfaat penelitian ini mampu

memberikan analisis teori Paulo Freire tentang kesadaran dehumanisasi dalam pendidikan yang diwujudkan dengan adanya kebijakan Kurikulum Merdeka. Selain itu, penelitian ini mampu memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi Pendidikan dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan penghapusan penjurusan jenjang Sekolah Menengah Atas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif yakni pendekatan penelitian yang fokus pada analisis interpretatif dan naturalistik dengan mengkaji pengalaman pribadi, studi kasus, data empiris, wawancara, observasi dan pengamatan yang digambarkan secara naratif (Toenlio, 2013: 2-3). Subjek penelitian ini adalah pendidik maupun peserta didik di SMA Negeri 3 Surakarta. Objek penelitian ini adalah menganalisis strategi sekolah dalam melaksanakan kebijakan penghapusan penjurusan yang dilihat menggunakan teori dehumanisasi pendidikan Paulo Freire. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi non partisipatif, wawancara terstruktur, dan studi

dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai salah satu teknik *non probability sampling* dengan melibatkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru BK, dan Peserta didik kelas X. Teknik analisis data pada studi ini mengacu pada metode analisis studi kasus Yin (2018) dengan tahapan merancang penelitian, pendekatan desain, pengumpulan data, analisis data, interpretasi temuan, dan pelaporan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

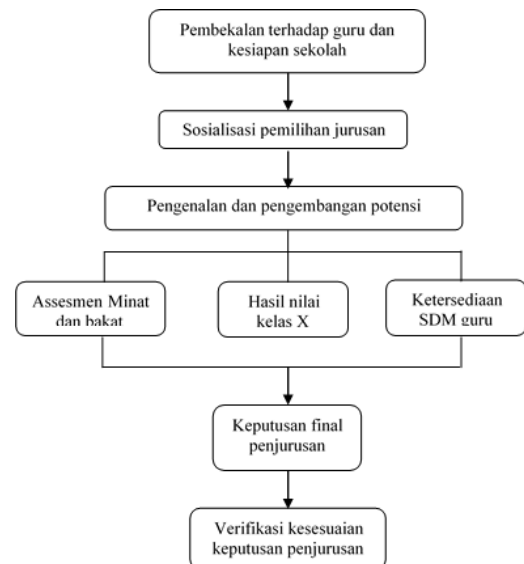
Kurikulum Merdeka yang menjadi kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini memberikan banyak perubahan dan kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan penghapusan pada jenjang Sekolah Menengah Atas. Kebijakan Penghapusan penjurusan ini memberikan kesempatan pada peserta didik menyalurkan aspirasi dan untuk menggali minat dan bakat yang dimiliki. SMA Negeri 3 Surakarta menjadi salah satu sekolah negeri yang melaksanakan kebijakan ini. Ketentuan kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 345/M/2022 yang berisikan mata pelajaran pendukung program

studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi.

Dalam surat keputusan dinyatakan bahwa SMA terdiri dalam dua fase yaitu Fase E untuk kelas X dan fase F untuk kelas XI & XII. Pada fase E inilah penjurusan dihapuskan atau dihilangkan. Berbeda dengan Kurikulum 2023, kelas X mempelajari seluruh mata pelajaran baik IPA maupun IPS yang diintegrasikan. Kemudian, pada kelas XI peserta didik memilih penjurusan dengan memilih mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Adapun pada hasil penelitian pelaksanaan kebijakan penjurusan di SMA Negeri 3 Surakarta didapatkan berikut.

1. Strategi Pelaksanaan Kebijakan

Strategi pelaksanaan kebijakan penjurusan di SMA Negeri 3 Surakarta telah disepakati dalam rapat pembekalan guru penggerak yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Surakarta sendiri yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek di beberapa wilayah termasuk Kota Surakarta. Adapun tahapan penjurusan dibagi menjadi tiga yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penetapan verifikasi. Secara lebih ringkas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1 Bagan Strategi Pelaksanaan Kebijakan Penjurusan di SMA Negeri 3 Surakarta

Tahap persiapan, pada tahap ini sekolah melakukan pembekalan terhadap pelaksana kebijakan meliputi guru mata pelajaran, guru wali kelas, guru BK dan tim manajemen sekolah termasuk kurikulum sekolah. Pembekalan ini membahas mengenai mengenai muatan mata pelajaran, panduan terkait pemilihan mata pelajaran, dan pedoman masuk perguruan tinggi.

Persiapan ini juga mencakup mengenai strategi sekolah dalam menetapkan sistem penjurusan yang akan dilaksanakan di kelas XI dengan menentukan jumlah peserta didik yang disesuaikan dengan sumber daya pendidik. Jumlah guru IPA di SMA Negeri 3 Surakarta lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah guru IPS. Berikut ini tabel data jumlah guru

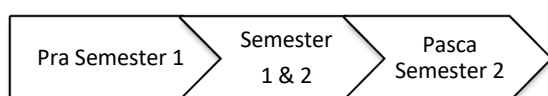
di SMA Negeri 3 Surakarta tahun 2023/2024.

Guru	Mata Pelajaran		
	Umum	IPA	IPS
Jumlah	43	15	11

Tabel 1. Data Jumlah Guru SMA Negeri 3 Surakarta

Tidak hanya jumlah pendidik, sekolah juga mempertimbangkan jumlah siswa dalam menentukan penjurusan. Jumlah keseluruhan siswa kelas X adalah 432 yang tersebar dalam 12 kelas mulai dari kelas X E 1 sampai X E 12. Masing-masing jumlah inilah yang menjadi pertimbangan kurikulum dalam menyusun rancangan penjurusan nantinya.

Tahap pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan ini sekolah melakukan proses pengenalan terhadap peserta didik maupun wali murid terkait dengan sistem penjurusan yang dihapuskan di kelas X pada Kurikulum Merdeka. Adapun pengenalan ini melalui dua cara yakni sosialisasi dan bimbingan. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan terbagi dalam tiga sesi, diantaranya yaitu:



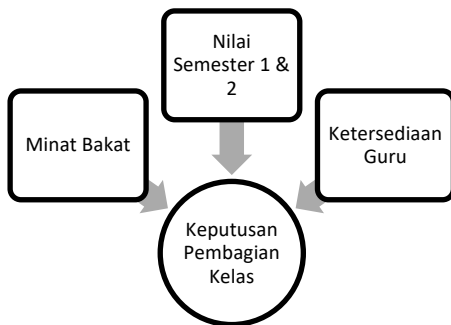
Gambar 2 Alur Pelaksanaan Kebijakan Penjurusan

Berdasarkan gambar alur pelaksanaan penjurusan tersebut tiga sesi ini berisikan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi pada masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS)
- (2) Sosialisasi dan pendampingan pada jam pelajaran Bimbingan Konseling (BK) dan sosialisasi dengan pihak wali murid
- (3) Pembekalan akhir untuk memilih mapel pilihan, memutuskan hasil pilihan peserta didik dan memverifikasi hasil keputusan persebaran kelas.

Pada pra semester peserta didik diberikan sosialisasi mengenai sistem penjurusan saat masa pengenalan lingkungan sekolah secara kolosal. Pembekalan awal ini meliputi pemahaman materi yang akan diajarkan di kelas X dan pemahaman mengenai sistem penjurusan oleh tim kurikulum sekolah. Pembekalan ini juga memberikan pemahaman bahwa penjurusan sekolah memperhatikan tiga aspek,

yang dapat dilihat ada gambar berikut:



Gambar 3 Gambar Aspek Penjurusan

Ketiga aspek inilah yang akan dilewati peserta didik dikelas X sebagai pertimbangan sekolah dalam menentukan jurusan dan pembagian kelas. Pada masa semester 1 dan semester 2 berjalan peserta didik diberikan pembekalan mengenai pengenalan potensi, bimbingan minat bakat dan rencana jenjang karier. Pembekalan ini dibimbing pada mata pelajaran BK dengan melakukan pengisian Asesmen kepribadian yang bernama *Holland Code (RIASEC) Test* berguna untuk mengukur minat dan bakat siswa. Selain itu, sekolah juga mengadakan rapat dengan wali murid untuk menjelaskan mengenai mekanisme penjurusan yang akan diterapkan pada Kurikulum Merdeka khususnya SMA Negeri 3 Surakarta.

Sesi terakhir yaitu pasca semester 2 sekolah memberikan

sosialisasi kepada peserta didik setelah peserta didik kelas X selesai melaksanakan Ulangan Akhir Semester 2 dan mulai untuk menentukan jurusan dikelas XI dengan memilih jurusan yang sesuai dengan nilai kemampuan belajar. Sosialisasi ini dilakukan secara kolosal yang bertujuan agar peserta didik mampu menentukan penjurusan dengan matang.

Tahap penentuan, sekolah menentukan penjurusan berdasarkan pembagian kelas. Seperti data yang sudah disebutkan diatas bahwa pembagian kelas sudah tidak lagi digolongkan IPA dan IPS. Namun, SMA Negeri 3 Surakarta membagi kedalam dua rumpun yang pada pengimplementasiannya rumpun A digunakan untuk semua mapel pilihan Sains (Kimia, Biologi, Fisika, Matematika peminatan) sedangkan rumpun B digunakan untuk mapel pilihan Sosial (Sosiologi, Geografi, dan Ekonomi). Mekanisme penentuan ini adalah peserta didik diberikan link form untuk mengisi pilihan rumpun dan mata pelajaran peminatan yang diinginkan disesuaikan dengan minat dan bakat. Setelah itu, pihak kurikulum

mengolah data tersebut untuk membagi peserta didik kedalam kelas dengan persebaran berikut:

Rumpun	Peminatan	Kelas
A	Ekonomi	XI F1, XI F2
	Geografi	XI F3, XI F4
	Bahasa Inggris	XI F5, XI F6, XI F7
	Biologi	XI F8, XI F9, XI F10
B	Bahasa Jerman	XI F11, XI F12,

Tabel 2 Data Pembagian Kelas XI SMA Negeri 3 Surakarta

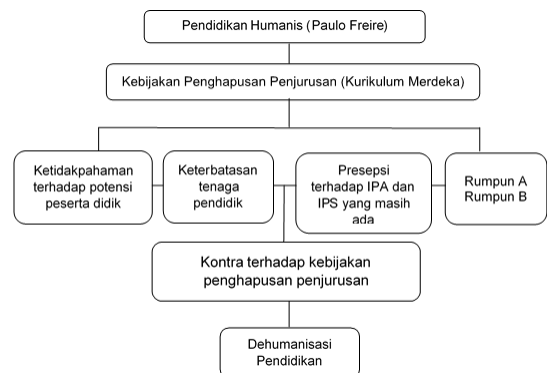
Pembagian kelas ini disesuaikan dengan jumlah guru dan peserta didik. Artinya, minat dan bakat peserta didik tetap tidak mengakomodasi sepenuhnya terhadap keputusan kelas yang dipilih. Setelah peserta didik dibagi kedalam rumpun kelas, kemudian sekolah melakukan verifikasi terhadap kesiapan dan mengevaluasi terhadap keputusan.

Verifikasi ini berguna untuk memastikan kembali apakah peserta didik mampu mengikuti seluruh keberjalanan kegiatan belajar sesuai dengan jurusan yang diperoleh. Bagi peserta didik diberikan waktu kurang lebih selama 2 minggu untuk peserta didik beradaptasi dengan

penjurusan yang diperoleh. Apabila terdapat peserta didik yang merasa tidak sesuai dengan kelas yang ditetapkan maka boleh berpindah dengan sistem barter antara satu dengan yang lain.

2. Analisis Dampak Kebijakan Terhadap Sistem Penjurusan di SMA Negeri 3 Surakarta

Pendidikan bukan hanya sebagai media menyampaikan mengenai ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik dengan mengeksplor kemampuan dalam berpikir kritis, berkontribusi positif terhadap perubahan, dan mencapai potensi penuh peserta didik sebagai manusia yang hidup dimasyarakat. Berikut ini adalah gambar mengenai hasil penelitian apabila dikaitkan dengan teori Dehumanisasi Pendidikan Paulo Freire.



Gambar 4 Analisis Dehumanisasi Pendidikan Pada Kebijakan Penghapusan Penjurusan

Berdasarkan analisis dehumanisasi pada kebijakan penghapusan penjurusan tersebut berawal dari asumsi Freire terhadap pendidikan yang membebaskan dan menjauhkan dari penindasan. Dehumanisasi pendidikan Paulo Freire identik dengan kebebasan dalam peserta didik memperoleh ilmu pengetahuannya. Hal tersebut yang ingin diwujudkan dalam penghapusan penjurusan ini. Tujuan dari kebijakan penghapusan penjurusan menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 antara lain yaitu:

- a. Meningkatkan keterampilan umum dan tidak berfokus pada bidang tertentu (IPA, IPS dan bahasa)
- b. Memberikan fleksibilitas terhadap peserta didik agar belajar sesuai dengan minatnya
- c. Memperluas bekal bidang karier kedepan dan mempersiapkan dunia kerja yang lebih dinamis
- d. Mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan WR

menjelaskan perbedaan Kurikulum 13 dengan Kurikulum Merdeka sebagai berikut.

“Kalo di kurmer dengan K13 beda, kalo K13 kan sudah dijuruskan, kalo sekarang semua mapel sama, semua anak dapat mapel yang sama. Nanti dikelas 11 yang beda” (WR, 25/06/2024).

Berdasarkan hasil pernyataan informan tersebut dapat dipahami bahwa letak perbedaan antara penjurusan Kurikulum 13 (K13) dengan Kurikulum Merdeka ada pada mekanisme penjurusannya. Dimana pada K13 sejak awal peserta didik sudah dijuruskan ke dalam IPA dan IPS. Berbeda dengan Kurmer, peserta didik diawal pembelajaran materi IPA dan IPS diintegrasikan dan dipelajari semuanya, kemudian di kelas XI peserta didik dijuruskan sesuai dengan minat, bakat dan potensinya dan tidak bergantung pada IPA dan IPS saja.

Dengan demikian, kurikulum merdeka semestinya relevan dengan teori dehumanisasi pendidikan Paulo Freire. Bagi Paulo Freire, merdeka belajar diartikan sebagai sebuah langkah memberikan pembelajaran yang membebaskan peserta didik dari segala macam penjajahan, seperti adanya banking system (Sesfao,

2020). Melihat dari tujuan kurikulum merdeka, sebenarnya kebijakan sudah mengarah pada kesadaran adanya dehumanisme dalam pendidikan dan mulai membangun pendidikan yang lebih humanis.

Pemikiran Freire mengenai dehumanisme muncul pada saat adanya anti kolonial dan perjuangan pembebasan individu dari penindasan politik, sosial dan ekonomi pada abad ke-20. Oleh karena itu, kurikulum merdeka memiliki kaitan dengan era klasik yaitu *liberal arts* yang model pendidikan yang membebaskan seseorang untuk menjalani segala aktivitasnya (*a free person*) (Mones et al., 2022).

Freire juga menegaskan bahwa pendidikan humanis diawali dengan adanya kesadaran kritis. Dalam mekanismenya, kesadaran kritis membentuk konsep pendidikan ini mengutamakan pembebasan dari bentuk penindasan dan dominasi seperti pada pendidikan konvensional (Freire, 1984). Menurut Freire (2007) pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang berorientasi pemahaman atas orientasi sebagai manusia yang

merdeka dan bebas dari situasi-situasi tertindas

Namun pada kenyataannya, pengimplementasian kebijakan ini masih banyak yang harus dibenahi dan dalam pelaksanaan masih terlihat adanya dehumanisasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

- a. Masih ada peserta didik yang tidak paham terhadap potensi, minat bakat dengan jurusan yang dipilih.
- b. Keterbatasan sumber daya pendidik yang mengakibatkan terbatasnya mata pelajaran pilihan peserta didik.
- c. Presepsi terhadap jurusan IPA dan IPS yang sulit dan masih melekat baik pada guru maupun peserta didik.
- d. Penjurusan yang masih sama, meskipun dalam artian penjurusan IPA, IPS dan bahasa diadakan diganti dengan sistem rumpun, tetapi sistem rumpun tetap merepresentasikan IPA dan IPS.

Dari hasil penelitian tersebut maka, membuktikan bahwa pada kenyataannya penghapusan penjurusan tetap tidak memberikan kebebasan terhadap

peserta didik dalam menentukan pilihannya. Peserta didik tetap harus mengikuti sistem penjurusan dari sekolah dimana mata pelajaran pilihan yang seharusnya dipilih sesuai minat namun pada praktiknya tetap terkotak-kotakan pada IPA dan IPS sehingga pada intinya penghapusan penjurusan tetap sama saja seperti pada sistem penjurusan pada kurikulum sebelumnya yaitu K13.

Padahal, keputusan dalam pemilihan penjurusan ini seharusnya mampu membuktikan bahwa peserta didik mampu untuk berpikir kritis dan terbuka dalam mengambil jenjang karier yang sesuai dengan bakat dan minatnya (Adhyatma, 2023). Hal ini juga disampaikan langsung oleh informan saat wawancara sebagai berikut:

“Ya jadi memang benar dikurikulum merdeka memang tidak ada penjurusan kalo dulu kita mengenal ada jurusan MIPA, IPS, dan Bahasa gitu ya. Kalo dikurikulum merdeka sudah tidak ada penjurusan, tetapi toh nanti lulusan SMA ini kan tetap diproyeksikan melanjutkan diperguruan tinggi mbak dan sebisa mungkin anak-anak kita bekal dengan pengetahuan yang cukup sesuai dengan minat yang akan diambilnya di perguruan tinggi. Maka, walaupun tidak ada penjurusan secara tegas di SMA 3 ini tetap ada strategi bagaimana

mengelompokan siswa untuk rumpun yang nanti bisa diproyeksikan untuk dia kuliah di prodi yang berbasis Saintek ataupun Soshum.” (AG, 25/06/2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka sepenuhnya kebebasan yang dimaksud dalam tujuan kebijakan ini belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut dilihat juga pada aspek kesulitan peserta didik dalam memahami potensi minat dan bakat. Tidak hanya itu, ketersediaan sumber daya pengajar yang tidak dapat menampung minat siswa yang mau tidak mau peserta didik tetap harus mengikuti sistem keputusan sekolah. Sehingga, pemikiran peserta didik masih terkotak-kotakan bahwa jurusan itu hanyalah IPA dan IPS, bahkan stereotipe ini jurusan ini masih ada hingga saat ini.

Artinya, penghapusan penjurusan ini tetap tidak mudah begitu saja mewujudkan pendidikan yang humanis dan memberikan kebebasan penuh dalam peserta didik menggali potensi serta ilmu pengetahuan. Bahkan, pergantian penjurusan yang dikenal dengan sistem rumpun tetap tidak dapat dijauhkan dari unsur dengan jurusan IPA dan

IPS. Padahal, sejatinya pendidikan yang sehat senantiasa menekankan pada peningkatan kualitas peserta didik yang sesuai dengan potensi yang dimiliki dan implementasi pendidikan harus dilakukan dengan prinsip keadilan bagi semua dan tidak memihak pada otoritas atau kepentingan pihak tertentu (Deviar & Pribadi, 2022).

Hakikat ini selaras dengan pemikiran Freire yang mengungkapkan bahwa sejatinya manusia mampu memahami keadaan lingkungan dan dirinya sendiri karena manusia diberikan bekal untuk mampu merubah situasi agar sesuai dengan pikirannya sendiri (Abdillah, 2017). Berbagai dampak yang ditimbulkan pada strategi SMA Negeri 3 Surakarta tersebut bahwa sebenarnya ketercapaian tujuan pendidikan tidak dapat diwujudkan dari satu aspek saja. Dalam hal ini perwujudan pendidikan yang lebih memerdekakan manusia harus didukung dengan aspek lain yang penting dan harus diperhatikan yaitu ketersediaan pendidik. Perencanaan apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang cukup maka

akan hasilnya akan tetap sama saja, bahwa dalam melaksanakan kebijakan penghapusan jurusan menunjukkan dehumanisasi di SMA Negeri 3 Surakarta masih terlihat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan penghapusan penjurusan yang dicanangkan oleh Mendikbudristek pada Kurikulum Merdeka khususnya di SMA Negeri 3 Surakarta dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Meskipun dalam hal ini IPA, IPS maupun bahasa sudah tidak lagi dipakai dalam istilah penjurusan di Kurikulum Merdeka. Namun, pada kenyataannya pemilihan mata pelajaran yang seharusnya dapat dipilih sesuai dengan kemauan minat bakat peserta didik tetap termarginalisasi pada rumpun IPA dan rumpun IPS. Pada pelaksanaan penghapusan penjurusan di SMA Negeri 3 Surakarta membuktikan bahwa kebebasan pendidikan yang seharusnya diwujudkan dalam kebijakan ini pada kenyataannya peserta didik masih memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihannya terkait mata pelajaran yang akan diinginkan. Hal ini juga

disebabkan karena kurangnya sumber daya pendidik sebagai akomodasi dalam peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan pemerintah kaitanya dengan pengimplementasian kebijakan ini. Tidak hanya itu, pemerintah seharusnya mampu mengukur kesesuaian aspek-aspek apa saja yang menjadi faktor keberhasilan penghapusan penjurusan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyatma, M. D. R. (2023). Program Pendampingan Integrasi Bakat dan Minat dalam Memilih Mata Pelajaran sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 16–51. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i4.9572>
- Apriadi, D., & Kuswandhie, R. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jurusan Pada SMA Bina Satria. *JUSIM (Jurnal Sistem Informasi Musirawas)*, 05(02), 101–109. <https://doi.org/10.32767/jusim.v5i02.970>
- Chaterine, R. N. (2022). Kurikulum Merdeka, Nadiem Tegaskan Tak Ada Lagi Jurusan IPA-IPS-Bahasa di SMA. *Kompas.Com*, 1.
- Deviar, S., & Pribadi, F. (2022). Mengungkap Praktik Dehumanisasi Pendidikan Pada Sekolah Kapitalis: Studi Kasus Di Sma Negeri 5 Surabaya. *Jurnal Paradigma*, 1–10. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/46586/39143/>
- Freire, P. (1984). *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. Gramedia.
- Freire, P. (2001). *Pendidikan yang Membebaskan*. Jakarta: Melibas (Media Lintas Batas).
- Freire, P. (2007). *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Pustaka Pelajar.
- Mones, A. Y., Masitoh, S., & Nursalim, M. (2022). Merdeka Belajar : Sebuah Legitimasi Terhadap Kebebasan dan Transformasi Pendidikan (Sebuah Tinjauan Pedagogi Kritis Menurut Paulo Freire). *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 8(2), 302. <https://doi.org/10.24235/jy.v8i2.11599>
- Permendikbud Nomor 162/M/2021, tentang Program Sekolah Penggerak.
- Permendikbud Nomor 345/M/2022, tentang Mata Pelajaran Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi.
- Sesfao, M. (2020). Perbandingan Pemikiran Pendidikan Paulo Freire Dengan Ajaran Tamansiswa Dalam Implementasi Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Nasional: Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran Tamansiswa*. 261–272. Yogyakarta, 7 Maret 2020.
- Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum

Merdeka Belajar. Prosding
Seminar Daring Nasional:
Pengembangan Kurikulum
Merdeka Belajar Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia.
13–28. 21 Oktober 2020.

Toenlio, A. J. (2013). *Pendekatan*
Penelitian Kualitatif Bidang
Pendidikan (Landaran, Teori, dan
Panduan). Malang: Ahlimedia
Press.

Undang-undang (UU) Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Yin, R. K. (2018). *Case Study*
Research and Application (Sixth
Edition). California: SAGE
Publications.